

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digitalisasi, laju pertumbuhan sistem digital begitu cepat dan masif. Digitalisasi sudah menyentuh seluruh lapisan dan elemen masyarakat serta merubah banyak aspek kehidupan dalam keseharian masyarakat. Perubahan tersebut terjadi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia dan telah membawa banyak sekali perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, serta pemerintahan (Bagoes Wijaya Kusuma Tarmizi & Sugiartono, 2022). Pemerintahan, sebagai salah satu bidang yang terdampak, mengalami perubahan dalam mengelola suatu negara atau daerah dan juga memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, tentu saja pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Alat dukung tersebut ialah Barang Milik Negara (BMN).

Barang Milik Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Amiri, 2014). Barang Milik Negara (BMN) merupakan instrumen vital negara yang harus dikelola dan dipelihara dengan baik. Proses pengelolaan dan pemeliharaan aset negara ini masuk dalam pengelolaan kekayaan negara. Pengelolaan barang milik negara (BMN) bertujuan untuk mendukung jalannya

operasional pemerintahan. Pemerintah sebagai pengelola BMN perlu melakukan pengelolaan BMN secara saksama, agar nantinya dapat bermanfaat bagi operasional pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya (Hikmah et al., 2014; Puspitoarum D. W, 2017).

Pengelolaan BMN pada instansi pemerintah di Indonesia merupakan hal yang wajib. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan BMN meliputi beberapa tugas pokok, antara lain: 1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) Pengadaan, 3) Penggunaan, 4) Pemanfaatan, 5) Pengamanan dan Pemeliharaan, 6) Penilaian, 7) Pemindahatanganan, 8) Pemusnahan, 9) Penghapusan, 10) Penatausahaan, 11) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (Indonesia, 2014). Namun, dalam pengelolaan BMN masih banyak perbedaan persepsi dalam tata kelola dan belum terakomodirnya peraturan yang ada. Hal ini, menyebabkan aset yang dikelola menimbulkan ketidakefektifan dalam perencanaan penganggaran dan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. BMN yang inventarisasi dan administrasi tidak dilakukan dengan baik akan mengakibatkan kerugian dengan hilangnya aset negara (Ghozali et al., 2018; Puspitoarum D. W, 2017).

Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki tugas untuk mengelola BMN seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia. Dalam prosesnya, Kementerian Keuangan sudah merilis beberapa aplikasi yang bertujuan untuk membantu K/L dalam mengelola BMN yang ada dimasing-masing K/L.

Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang wajib digunakan oleh K/L dalam melaksanakan pengelolaan BMN. SIMAN merupakan aplikasi yang khusus dibuat untuk administrasi BMN saja, sedangkan SAKTI merupakan aplikasi yang ada untuk mengelola BMN dan juga keuangan. Dengan adanya dua aplikasi tersebut diharapkan K/L dapat mengelola BMN sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku sehingga tidak terjadi kerugian negara akibat dari kesalahan pengelolaan BMN. Namun, dikarenakan adanya dua aplikasi yang ada, meskipun sudah terintegrasi data antara kedua aplikasi tersebut, ternyata tetap menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan manajerial terkait pengelolaan BMN maupun pengelolaan BMN itu sendiri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sebagai instansi pemerintahan yang merupakan salah satu Eselon 1 Kementerian Keuangan, dalam melakukan pengelolaan BMN internal unit eselon 1, menginisiasi media baru untuk membantu merencanakan kebijakan dan strategi manajemen yang tepat dengan menggunakan dasar informasi dan analisis data yang lebih lengkap dan memadai untuk tercapainya perencanaan penganggaran, kebutuhan, dan penghapusan BMN yang pada akhirnya akan membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada data tadi. Dengan langkah tersebut, proses bisnis berimplikasi dan bisa berjalan lebih efisien terhadap peningkatan kinerja. Media baru tersebut berupa *Automatic Bussiness Intelegence Dashboard* (ABID) sebagai *dashboard* yang mengakomodir dalam aspek manajerial keuangan dan barang dengan aplikasi SIMKA atau Sistem Manajemen Keuangan dan Aset.

SIMKA atau Sistem Manajemen Keuangan dan Aset merupakan aplikasi hasil *reengineering* dari aplikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu Si-PAT dan SAKURA. Implementasi SIMKA bertujuan untuk menjaga sinergi dan keseimbangan antara keuangan dan BMN sebagai suatu siklus operasi yang utuh (DJPb, 2021). Dengan begitu, proses pengelolaan BMN dan pengambilan keputusan manajerial terkait pengelolaan BMN dapat tetap sasaran dan tepat guna. Untuk mendukung implementasi SIMKA, Sekretariat Direktorat Jenderal DJPb sudah mewajibkan seluruh kantor vertikal DJPb untuk melengkapi data isian BMN sejak Tahun 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh penerapan SIMKA di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Saumlaki selaku kantor vertikal DJPb. Hasil penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam karya tulis yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dan Aset (SIMKA) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Saumlaki”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa keunggulan aplikasi SIMKA dibanding aplikasi lain yang sejenis?
2. Apa manfaat yang diterima dari implementasi aplikasi SIMKA di kantor vertikal DJPb?
3. Apa pengaruh SIMKA terhadap pengambilan keputusan manajerial di DJPb?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui keunggulan aplikasi SIMKA dibandingkan dengan aplikasi lain yang sejenis.

2. Mengetahui manfaat yang diterima kantor vertikal DJPb dari implementasi aplikasi SIMKA.
3. Mengetahui pengaruh SIMKA terhadap pengambilan keputusan manajerial di DJPb.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini, ruang lingkup penulisan yaitu pengelolaan BMN dengan aplikasi SIMKA di kantor vertikal DJPb, khususnya KPPN Tipe A2 Saumlaki.

1.5 Manfaat Penulisan

Hasil penelitian karya tulis tugas akhir berikut diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- **Manfaat Teoritis**

Dengan hasil dari penulisan karya tulis ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait Aplikasi SIMKA dan juga pengaruh penerapan Aplikasi SIMKA pada kantor vertikal DJPb khususnya di KPPN Tipe A2 Saumlaki.

- **Manfaat Praktis**

- a) **Bagi Penulis**

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi media bagi penulis untuk menambah wawasan terkait Pengelolaan BMN.

- b) **Bagi Akademik**

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi di pustaka PKN STAN terkait Pengelolaan BMN.

- c) **Bagi Pembuat Kebijakan**

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai pengelolaan BMN.

d) Bagi Pembaca

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai Pengelolaan BMN dengan aplikasi SIMKA pada kantor vertikal DJPb khususnya KPPN Tipe A2 Saumlaki.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi deskripsi umum, latar belakang, ruang lingkup, serta sistematika penulisan terkait penulisan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori berisi teori-teori yang mendukung dan menjadi acuan atas topik yang penulis ambil. Teori-teori yang akan diuraikan meliputi pengertian Barang Milik Negara, pengelolaan Barang Milik Negara, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, mekanisme penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara dan kelebihan dan kekurangan aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang dipakai dalam pembuatan karya tulis tugas akhir ini dan membahas terkait perbandingan pengelolaan Barang Milik Negara antara aplikasi SIMKA dengan aplikasi pengelolaan Barang Milik Negara lain. Serta, apa dampak yang ditimbulkan dari penerapan aplikasi SIMKA pada kantor lingkup

Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Saumlaki dalam pengambilan keputusan manajerial.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah penulis bahas di bab sebelumnya serta simpulan dari tujuan yang ingin penulis capai.